

# Maisaroh Umsida

*by* Maisaroh Umsida

---

**Submission date:** 23-Feb-2024 02:33PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2302308222

**File name:** Nur\_Siti\_Maisaroh.docx (1.2M)

**Word count:** 6508

**Character count:** 43359

# Implementation of the Electronic Service Manuscript Application Program (e-buddy) in the Prasung Village Government, Buduran District, Sidoarjo Regency

## Implementasi Program Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (e-buddy) Di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Nur Siti Maisaroh<sup>1)</sup>, Isnaini Rodiyah<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>\*</sup>Email Korespondensi: [isnainirodiyah@umsida.ac.id](mailto:isnainirodiyah@umsida.ac.id)

**Abstract.** This research aims to determine the implementation of the Electronic Official Document Application Program (e-buddy) in the Prasung Village Government, Buduran District, Sidoarjo Regency. This research uses qualitative descriptive. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Research findings show that the implementation of e-buddy in the Prasung Village Government still does not meet the four variables of the policy implementation model which are stated in relation to communication, resources, disposition and bureaucratic structure, the theory expressed by George Edward III. The results of this research show that e-buddy implementation is viewed from four indicators, namely, 1). Communication has been implemented but there are still shortcomings in the delivery of e-buddy. 2). Resources, in this indicator, there are still village officials who are not able to apply e-buddy regularly. 3). Disposition, in this indicator, the Prasung Village Government in appointing bureaucracy refers to Village Law Number 6 of 2014. 4). Bureaucratic structure, in this indicator, the Prasung Village Government is in accordance with Regent Regulation Number 30 of 2020.

**Keywords -** Implementation; E-Government; E-Buddy

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (e-buddy) Di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-buddy di Pemerintah Desa Prasung masih belum memenuhi empat variabel model implementasi kebijakan yang dinyatakan dalam kaitannya dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, teori tersebut diungkapkan oleh George Edward III. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi e-buddy ditinjau dari empat indikator yaitu, 1). komunikasi sudah terlaksana namun masih ada kekurangan dalam penyampaian e-buddy. 2). Sumber daya, dalam indikator ini Aparatur desa masih ada yang belum mampu mengaplikasikan e-buddy secara teratur. 3). Disposisi, pada indikator ini Pemerintah Desa Prasung dalam pengangkatan birokrasi mengacu pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. 4). Struktur birokrasi, pada indikator ini Pemerintah Desa Prasung sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020.

**Kata Kunci -** Implementasi; E-Governmen; e-buddy

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan administrasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam lingkup pekerjaan atau organisasi khususnya pada instansi pemerintah maupun swasta. Dalam kegiatan administrasi tidak akan terlepas dari kegiatan ketatausahaan karena dengan adanya ketatausahaan dapat mempermudah menjalankan suatu tujuan dalam organisasi sebab ketatausahaan mengandung informasi penting yang ditujukan untuk pimpinan serta anggota dari organisasi tersebut [1]. Dari penjelasan tersebut maka bisa dikatakan bahwa ketatausahaan adalah bagian keseluruhan dari proses administrasi, dengan demikian ketatausahaan sangatlah penting untuk membantu suatu pekerjaan dalam organisasi contohnya yaitu kegiatan surat menyurat seperti pemrosesan surat masuk dan surat keluar yang didalamnya terdapat penerimaan, pencarian, pendistribusian serta pengarsipan dokumen yang dianggap penting bagi organisasi tersebut.

Seiring dengan perkembangan waktu, teknologi informasi dapat berubah secara pesat dan semakin modern hal ini dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam melakukan segala sesuatu. Hal ini dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government [2]. Arahannya menyatakan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai peningkatan kemampuan pemrosesan, pengelolaan, dan saluran, dan mendistribusikan informasi. Dengan adanya E-Government bermanfaat untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan keterbukaan, kemudahan akses serta keterpaduan akses informasi antar pemerintah, pemerintah harus memperbaiki diri untuk mengembangkan sistem administrasi publik berbasis internet yang baik, efektif, transparan dan efisien, khususnya melalui penerapan E-Government melalui penerapan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) atau aplikasi pencatatan

publik elektronik yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menpan RB No. 6 Tahun 2011 mengenai dasar panduan Tata Naskah Dinas berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintahan [3]. Sedermyanti (2015) menegaskan bahwa Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan melalui platform yang disimpan di sistem dan diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung ke koneksi internet [4].

Melihat bagaimana pentingnya peranan surat dinas, maka harus diberikan perhatian khusus agar dapat mendukung penyelesaian pekerjaan OPD secara aktif dan efisien, dengan menerapkan sistem digitalisasi yang dimana informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk digital melalui media elektronik [3]. Untuk memenuhi tujuan E-Government seperti yang ditulis Kusnadi & Ma'ruf (2017) ialah menghubungkan jaringan komunikasi antara warga negara, pelaku swasta, dan pemerintah lainnya untuk memfasilitasi interaksi, transaksi, dan layanan [5]. Lebih jauh lagi, E-Government bertujuan untuk meningkatkan kesempatan warga negara dalam menggunakan layanan publik yang disediakan oleh lembaga publik, meminimalkan keluhan warga, dan meningkatkan kualitas layanan yang dirasakan oleh seluruh warga negara. Contohnya seperti beberapa aplikasi yang terdapat di beberapa daerah beberapa diantaranya adalah, aplikasi E-Office yang terdapat pada Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan suatu wujud dalam digitalisasi administrasi maupun pengarsipan yang semula dilakukan secara manual kemudian dilakukan secara elektronik [6]. Ada juga Sinda adalah terobosan atau teknologi inovasi dalam Sistem Layanan Persetujuan di Provinsi Kalimantan Selatan [7].

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Naskah Dinas Elektronik *Smart City* Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Dengan membuat inovasi berbasis elektronik yang disebut dengan e-buddy. e-buddy adalah system surat menyurat yang merupakan pengembangan dari E-Governance G2E (Koordinasi pemerintah dan pegawai adalah bentuk e-pemerintah yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan layanan dan informasi antara lembaga pemerintah dan pegawainya). Aplikasi e-buddy Sidoarjo merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk manajemen ASN yang ada di OPD Kabupaten Sidoarjo [8]. Tujuannya adalah untuk menerima surat antara karyawan dan anggota serta mengeluarkan surat mengenai kegiatan. Salah satu keunggulan e-buddy adalah hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan pemesanan. Disposisi adalah perintah yang diberikan kepada personel atau unit mengenai pengiriman dan penerimaan surat serta aktivitas kehadiran online.

Penerapan e-buddy sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kearsipan Umum Secara Elektronik, mendorong berkembangnya E-Government dalam Sistem Pemerintahan Sidoarjo [9]. Sebelum tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih menggunakan komunikasi manual, instruksi pemesanan, pencatatan kehadiran, atau sistem berbasis kertas. Dalam perkembangan E-Government dalam Peraturan Daerah Kabupaten, Pemerintah mengganti sistem kertas dengan media elektronik. e-buddy juga bertujuan untuk memantau seluruh aktivitas instansi Pemerintah Sidoarjo. Permohonan tersebut meliputi ketidakhadiran pejabat negara, surat yang diterima, surat yang dikirimkan, dan surat perintah penangkapan (perintah). Karena isi aplikasi yang beragam, semua kegiatan selalu mengalami perubahan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Aplikasi ini juga membantu mengolah informasi yang ada melalui integrasi satu data dalam satu dashboard, sehingga instansi lain di bawahnya dapat lebih mudah melihat kegiatan secara lebih transparan, salah satunya bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat kegiatan korespondensi resmi. Keperluan administrasi lebih dimudahkan efektif melalui fitur surat keluar dan masuk yang juga dilengkapi dengan rincian setiap huruf dan status perkembangannya.

*Gambar 1: Halaman Aplikasi E-Buddy Sidoarjo*



Sumber : Website [e-buddy.sidoarjokab.go.id](http://e-buddy.sidoarjokab.go.id) (2023)

Salah satu Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo yang mengimplementasikan e-buddy adalah Pemerintah Desa Prasung. Desa Prasung terletak di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Dalam hal pengelolaan surat menyurat baik surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat. Aparat Pemerintah Desa Prasung memiliki akun pribadi e-buddy [10]. Kepala Tata Usaha dan Umum yang bertanggung jawab sebagai admin e-buddy di Pemerintah Desa Prasung menjelaskan mengenai prosedur operasional e-buddy yaitu jika ada surat masuk dari OPD lain untuk Pemerintah Desa Prasung, surat tersebut otomatis akan masuk ke akun e-buddy Pemerintah Desa Prasung, maka jika ada surat masuk dari OPD atau instansi lain yang tidak ada dalam daftar OPD di OPD Pengirim, admin dapat menambah atau membuat masukan baru surat ke fitur surat masuk, lalu isi identitas sesuai dengan surat yang diterima. Setiap aparatur dapat menyusun surat keluar dengan template yang dapat diunduh dengan a file dengan ekstensi .docx di aplikasi e-buddy dan pengguna dapat menggunakan Microsoft Kata untuk mengubah konteks surat sesuai dengan rancangan surat yang akan dibuat. Dalam kegiatan surat keluar, surat harus berekstensi .docx agar dapat diunggah ke e-buddy yang minimal berisi nomor dan qr code untuk tanda tangan elektronik sesuai format surat e-buddy. Kemudian jika ada surat yang membutuhkan disposisi, maka yang meneruskan surat kepada pimpinan adalah admin. Demikian disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, keberadaan aplikasi e-buddy sangat membantu dan memudahkan proses pengurusan surat dinas, baik pencarian dan pendistribusian.

Namun berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa permasalahan yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum yaitu admin e-buddy, Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sebelum adanya e-buddy dalam pengelolaan surat dinas sebelumnya masih dilakukan secara manual apabila ada surat masuk atau surat keluar maka surat tersebut akan ditulis dalam agenda lalu data-data tersebut disimpan dilemari arsip, untuk itu membutuhkan tempat yang cukup besar untuk penyimpanan data, dan butuh waktu yang lama untuk mencari data yang dibutuhkan kembali. Dan ketika kepala desa prasung mempunyai pekerjaan diluar kantor desa prasung surat yang seharusnya terdisposisi dengan cepat mengalami penundaan, akibatnya proses penyampaian informasi dari kepala desa prasung ke penerima tugas mengalami keterlambatan hal ini dikarenakan surat tersebut tidak segera diproses. Tidak hanya disitem surat menyurat saja yang terdapat Permasalahan, disistem absensi juga terdapat permasalahan yang dimana seharusnya semua Aparat Pemerintah Desa Prasung tertib melakukan absensi namun masih ada beberapa Aparat desa prasung yang masih belum menggunakan system absensi di Aplikasi e-buddy hal ini membuat peluang untuk terlambat hadir tepat waktu sangatlah banyak.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum juga menjelaskan bahwa dalam pengimplementasian aplikasi e-buddy dalam pendisposisian surat, admin tidak meneruskan surat dinas secara maksimal melalui e-buddy kepada pihak yang berwenang untuk mendisposisi surat tersebut yaitu kepala desa atau sekretaris desa. Dikarenakan implementasi penggunaannya masih belum paham secara maksimal dan keterbatasan kemampuan yang masih belum mampu beradaptasi. Hal ini membuat pemrosesan surat menjadi lebih lambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat dimana pendisposisian surat sangat penting untuk organisasi, untuk itu pendisposisian surat harus dipercepat agar perintah yang tertera dalam surat tersebut cepat dilaksanakan.

**Tabel 1.** Pengelolaan surat dinas pada akun e-buddy Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

No	Tujuan Surat	Surat Masuk			Disposisi Surat			Surat Keluar		
		Tahun			Tahun			Tahun		
		2021	2022	Januari- Juli 2023	2021	2022	Januari- Juli 2023	2021	2022	Januari- juli 2023
1	Kepala Desa	83	88	90	-	-	85	-	-	78
2	Sekretaris Desa	77	82	48	-	-	43	-	-	32

Sumber: Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo (2023)

Berdasarkan pemaparan tabel 1, Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo mulai aktif menggunakan aplikasi e-buddy sejak tahun 2021 dalam kegiatan surat menyurat dinas. Jika dilihat dari tabel 1 dari sekian banyaknya surat dinas yang masuk mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2022 masih belum ada surat yang

terdisposisi, pada tahun 2023 sudah mulai aktif dalam mendisposisi surat namun masih mengalami penurunan, sementara surat keluar untuk alasan surat juga masih mengalami penurunan. Oleh karena itu Implementasi kebijakan mempunyai peran penting dalam seluruh rangkaian proses kebijakan, untuk itu suatu kebijakan harus diimplementasikan agar memberikan dampak dan tujuan yang diinginkan. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan yakni membentuk program-program yang telah dibuat dan disepakati melalui keputusan-keputusan kebijakan public. Teori implementasi kebijakan oleh George Edward III merupakan suatu proses yang penting. Sebab sebaik apapun suatu kebijakan, apabila implementasinya tidak direncanakan dengan baik maka tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai dan sebaliknya [11]. Oleh karena itu terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang Aplikasi surat dinas yang berbasis elektronik. Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Khofifatul Ummah (2023), dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi *E-Government* Melalui Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (*E-Buddy*) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)". Dalam jurnal penelitian, peneliti mengambil metode deskriptif kualitatif serta menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian sebelumnya yaitu dalam penerapannya masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi [12]. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori George Edward III, perbedaannya pada penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Penelitian kedua, dilakukan oleh Vikri Aditya Suryansyah, Indah Murti, Dida Rahmadanik (2022) Dalam penelitiannya yang berjudul "Inovasi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Penggunaan *E-Buddy*". Dalam jurnal penelitian, peneliti menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam inovasi dan pelayanan BPBD sudah berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti: Relatif Keunggulan, kesesuaian, kesantunan, kemungkinan untuk dicoba, kemudahan di amati [13]. Persamaan pada penelitian keduanya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya lebih membahas untuk pengimplementasian di sektor dinas sedangkan pada penelitian sekarang lebih membahas pengimplementasian di Pemerintah desa. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ariani Pujilestari dan Irfan Ridwan Maksam (2022), dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta" penelitian ini mengambil metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian-penelitian sebelumnya khususnya implementasi aplikasi pencatatan publik elektronik pada pelayanan kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) belum berhasil. Hal ini disebabkan karena sub dimensi "mobilisasi sumber daya" dan "pemantauan tindakan dan kemajuan" belum dilaksanakan secara optimal, dan masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan permintaan pencatatan publik secara elektronik ke kantor pusat setempat [14]. Persamaan pada dua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang aplikasi naskah dinas elektronik, namun perbedaannya ialah pada penelitian sebelumnya menggunakan teori Brinkerhoff dan Crosby.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk memilih tempat penelitian di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Tujuannya karena ingin mengetahui bagaimana implementasi aplikasi e-buddy dalam pengelolaan surat dinas di Pemerintah Desa Prasung. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah judul "Implementasi Program Aplikasi Elektronik (e-buddy) Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo".

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Anselm Strauss berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik termasuk bentuk hitungan lainnya [15]. Penelitian ini menghasilkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi. Penentuan informan yaitu menggunakan *purposive sampling*. Informan yang ada dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Prasung, kepala tata usaha yang sebagai admin aplikasi e-buddy itu sendiri dan sekretaris Desa. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori dari George Edward III. Teknik analisis menurut Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh [16]. Tahapan analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penelitian, berdasarkan realita Implementasi Program Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (e-buddy) Di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, meneliti mengidentifikasi menggunakan pedoman George Edward III. Dalam teori-teori implementasi kebijakan yang sudah mapan, terdapat empat variabel yang sangat menentukan proses implementasi kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, kekuasaan, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### 1. komunikasi

Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kita seringkali mengambil keputusan yang salah, termasuk dalam hal komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang diperlukan dalam suatu organisasi agar pimpinan dan pegawainya dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu komunikasinya harus jelas agar dapat dipahami [17]. Komunikasi juga dapat menghubungkan berbagai informasi yang kita terima dan membuat kita menjadi paham dengan apa yang sebelumnya tidak kita pahami [18]. Pada komunikasi kebijakan yang ditegaskan oleh George Edward III terdapat beberapa sub indikator yang harus diterapkan, agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu : transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Transmisi, Transmisi atau penyampaian komunikasi yang tepat juga mengarah pada penerapan yang tepat [18]. Untuk itu setiap kebijakan harus disampaikan kepada para pelaksana sebelum ditindaklanjuti. Komunikasi ini bersifat satu arah yaitu dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan [12]. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Syafi'i S.AP.M.AP selaku Kepala Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

*"pertama kali diadakannya sosialisasi mengenai E-Buddy pada tahun 2020, melalui zoom meeting dan ada siaran langsung yang terhubung dengan youtube juga, yang diikuti oleh OPD Kabupaten Sidoarjo, diantaranya yaitu Kepala Perangkat Daerah, Kepala Puskesmas, Korwil Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah SD dan SMP, dan Kepala Desa"*.

Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024. Pada hasil pernyataan diatas bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

**Gambar 2.** Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi e-buddy di Lingkungan OPD Kabupaten Sidoarjo 2020



Sumber: Youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (2024)

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan bahwa telah dilakukannya sosialisasi sekaligus bimbingan teknis secara online yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan diikuti oleh setiap OPD yang ada diseluruh Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya gambar 2 tersebut membuktikan bahwa sosialisasi terkait implementasi aplikasi e-buddy sudah terlaksana.

Kejelasan, George Edward III menegaskan bahwa jika suatu kebijakan dapat diimplementasikan sesuai keinginan, maka instruksi implementasinya tidak hanya dapat diterima oleh pelaksana kebijakan, namun komunikasinya juga harus jelas [19]. Oleh karena itu, komunikasi harus jelas dan tidak ada ruang untuk penafsiran yang berbeda-beda oleh para pelaksana, dan diperlukan ketepatan dan keakuratan informasi kebijakan [12]. Sehingga dengan adanya kejelasan pengguna aplikasi E-Buddy tidak perlu bingung ketika ada kendala dalam mengimplementasikannya. Contohnya seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Luluk selaku Kepala Tata Usaha sekaligus operator E-Buddy

*"jika saya mengalami kendala, langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama melihat ulang siaran langsung yang ada di youtube pada acara pertama kali sosialisasi sekaligus bimbingan teknis yang dilakukan secara online oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua saya akan menghubungi grup WhatsApp yang sudah disediakan untuk teknisi aplikasi e-buddy diseluruh Kabupaten Sidoarjo. serta ada bimbingan teknis dari*

*Pemerintah Kecamatan Buduran yang dilakukan secara tatap muka, namun bimbingan teknis tersebut tidak dilakukan secara berkala”.*

Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat fitur dan bimbingan teknis online dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan bimbingan teknis tatap muka dari Pemerintah Kecamatan Buduran, namun untuk bimbingan teknis masih belum dilaksanakan secara teratur.

**Gambar 3.** Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi e-buddy Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo



*Sumber: Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo (2024).*

Berdasarkan gambar 3, menunjukkan bahwa surat undangan dari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan untuk Sekretaris, Kasi Pelayanan, dan Kaur Tata Usaha dan Umum di seluruh Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Buduran. Dalam rangka menghadiri bimbingan teknis implementasi aplikasi e-buddy secara tatap muka yang diadakan di Five Hotel Pucang Sidoarjo, pada tanggal 10 November 2021. Dengan adanya surat tersebut membuktikan bahwa sudah dilakukan bimbingan teknis terkait implementasi aplikasi e-buddy namun masih belum dilakukan secara teratur.

Konsistensi, Menurut Edward III, perintah yang diberikan pada saat melakukan komunikasi harus konsisten dan jelas agar dapat diidentifikasi atau ditegakkan. Jika perintah yang diberikan sering berubah, hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi operator lapangan [20]. Untuk itu konsistensi juga penting untuk komunikasi. Karena Keharusan penegakan kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana untuk mengambil langkah-langkah yang sangat fleksibel dalam menafsirkan dan kemudian menerapkan kebijakan tersebut untuk mewujudkan tujuan politik. Berdasarkan pernyataan tersebut pelaksanaan penyampaian informasi surat dinas melalui aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Prasung masih belum konsisten dalam penyampaian surat masuk, surat keluar, dan disposisi. dikarenakan admin E-Buddy di Desa Prasung terkadang tidak menyampaikan lewat aplikasi E-Buddy melainkan menggunakan WhatsApp. Seperti yang sudah dijelaskan oleh operator aplikasi E-Buddy di Desa Prasung

*“untuk penyampaian surat kami masih belum sepenuhnya menyampaikan lewat aplikasi E-Buddy terutama penyampaian ke RT/RW karena masih belum tersedianya aplikasi E-Buddy untuk RT/RW, namun untuk OPD lain kita usahakan meneruskan surat melalui aplikasi E-Buddy”*

Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024.

**Gambar 4.** Chat WhatsApp penyampaian surat dinas di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo (2024).

Berdasarkan gambar 4 dan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian surat ke RT/RW masih dikirim menggunakan grup WhatsApp, dikarenakan pada tingkat RT/RW tidak menggunakan aplikasi e-buddy. Hal tersebut sangat disayangkan dan dapat menyebabkan penyampaian surat tidak konsisten.

Istilah pemahaman mengacu pada proses penyampaian yang dilakukan seseorang sebagai hasil hubungan sosial. Komunikasi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang mengirimkan pesan kepada orang lain, baik secara lisan, tertulis, atau tidak langsung melalui media apapun, untuk menginformasikan atau mengubah pendapat, sikap, ide, atau tindakan [21]. Hasil penelitian Berdasarkan wawancara terkait indikator komunikasi pada implementasi aplikasi e-buddy di Pemerintah Desa Prasung sudah terlaksana. Namun masih memiliki kekurangan seperti tidak teraturnya bimbingan teknis dan kurangnya pelaksanaan penyampaian informasi surat dinas melalui aplikasi e-buddy masih belum konsisten dikarenakan penyampaiannya masih ada yang menggunakan WhatsApp. Temuan <sup>(1)</sup> sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Khofifatul Ummah dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2023), berjudul *Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dalam penyampaian informasi mengenai surat dinas di Pemerintah Desa Kajeksan sudah terlaksana dan berusaha konsisten serta saling berkoordinasi dalam penyampaian surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat. Namun dalam implementasinya terkadang mengalami kendala dimana penyampaian surat masuk dari OPD lain yang diterima oleh admin tidak konsisten dikirimkan melalui akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan melainkan melalui chat WhatsApp.(12)

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu indikator yang mempunyai pengaruh besar terhadap proses implementasi kebijakan. Sumber daya dengan kapasitas dan keahlian yang baik juga akan membantu pemerintah mengarahkan dan melaksanakan kebijakan dengan baik karena setiap kapasitas sumber daya yang diberikan akan sebanding dengan hasil lapangan kerja yang diciptakan [18]. Indikator sumber daya yang dikemukakan oleh Edward III yaitu : sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya anggaran, dan wewenang. Namun disini peneliti hanya menggunakan sub indikator sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan kewenangan.

Sumber daya manusia, Sumber daya manusia merupakan aset organisasi dan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan [22]. Salah satu penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah karena ketidakmampuan, kekurangan dan kekurangan sumber daya manusia di bidangnya, karena sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah statistic [18]. Begitupun sebaliknya, apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkinerja baik maka implementasi dari kebijakan tersebut dapat berjalan dengan optimal [23]. Untuk melaksanakan kegiatan surat menyurat dinas pada aplikasi E-Buddy diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni. pelaksanaannya di Pemerintahan Desa Buduran didukung oleh operator yang memiliki kemampuan pengelolaan teknologi informasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kaur TU.

*“implementator yang mempunyai tanggung jawab mengelola akun e-buddy Desa Prasung adalah saya sendiri sebagai Kaur TU, terkadang saya mengalami kendala dalam pengiriman melalui aplikasi elektronik e-buddy ini. Dan sebagian aparatur pemerintah desa Prasung ada yang belum aktif menggunakan aplikasi e-buddy untuk mengirimkan pesan email ke akunnya. karena beberapa aparatur di pemerintah Desa Prasung pun kurang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi”.*



Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024. Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa Sumber Daya manusia di Pemerintah Desa Prasung masih belum mampu melakukan kinerja dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya optimal dalam mengimplementasikan aplikasi e-buddy.

Sumber daya fasilitas, Ketersediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas sangat diperlukan bagi setiap organisasi, hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Infrastruktur merupakan elemen tambahan untuk mendukung proses koordinasi kinerja pelaksana dengan tujuan memfasilitasi segala permasalahan pengelolaan [24]. Terkait dengan fasilitas penerapan aplikasi e-buddy Kaur TU menjelaskan bahwa

*“untuk fasilitas yang diterapkan oleh pemerintah desa Prasung sudah cukup lengkap, disini sudah tersedia komputer, keyboards, mouse, CPU, printer, AC, dan ada juga jaringan internet. Tapi kalau jaringan internetnya kadang tidak ada sinyal atau bermasalah ya jadi masalah juga buat proses surat-menyuratnya”*.

Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024. Berdasarkan hasil wawancara tersebut operator e-buddy atau Kaur Tu mengungkapkan bahwa untuk fasilitas sudah cukup memadai namun Jika terjadi permasalahan pada internet tidak segera diperbaiki akibatnya korespondensi dalam kegiatan surat menyurat tidak dapat berlangsung secara maksimal.

Kewenangan, Menurut Edward III Agar suatu perintah dapat dilaksanakan, wewenang biasanya harus bersifat formal. Wewenang adalah hak dan tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik. Terkait dengan pengimplementasian aplikasi e-buddy di Desa Prasung yang dilakukan wawancara pada tanggal 10 Januari 2024, sekretaris Desa mengungkapkan bahwa

*“untuk kewenangan kami menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 98 Tahun 2022, dalam peraturan tersebut yang bertanggung jawab dan menjadi admin atas aplikasi e-buddy di Pemerintah Desa Prasung yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dengan adanya tanggung jawab tersebut admin harus menyampaikan informasi terkait surat masuk, pendisposisian surat kepada perangkat desa yang lain, tidak hanya itu admin juga berwenang untuk membuat surat keluar untuk instansi di seluruh OPD Kabupaten Sidoarjo”*

**Gambar 5.** Sistem informasi di Pemerintah Desa beserta Penanggung jawabnya

Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari :

No	Nama Aplikasi	Penanggungjawab (Kaur/Kasi/Kausu)
1	Siakcudes	kaur keuangan
2	Sipades	kaur tu
3	Prodeskel	kaasipem desa
4	Epedcakel	kaasipem desa
5	Sipraja	kasi pelayanan
6	SID	Sekdes
7	IDM	kasi kesra
8	SDG's	kasi kesra
9	Piavon	kasi pelayanan
10	Simanis	kasi pelayanan
11	D/DC	kaur perencanaan
12	Sipede	kaur tu
13	Simpel	kaur perencanaan
14	SIKS-NG	kasi kesra
15	Ebuddy	kaur tu
16	Omspan	kaur keuangan
17	Rupabumi	kaasipem desa
18	desa.go.id	kaasipem desa
19	portal data kinerja	Sekdes
20	Sipd	kaur perencanaan
21	e skm	kasi pelayanan
22	Puskesmas	Kasi kesra

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (2024).

Berdasarkan hasil dari wawancara dan gambar 5, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Prasung mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 95 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada gambar tersebut tertulis bahwa yang bertanggung jawab atas implementasi aplikasi e-buddy adalah Kaur TU. Tugas Kaur TU sendiri dalam implementasi e-buddy yaitu menerima dan menyampaikan surat masuk, mendisposisi surat, serta membuat surat keluar untuk instansi di seluruh OPD Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya Peraturan tersebut membuktikan bahwa tidak sembarangan orang yang bertanggung jawab atas aplikasi e-buddy.

Dimensi sumber daya mencakup jumlah karyawan dan kompetensi pelaksana. Jika kuantitas dan kualitas tidak mencukupi, efektivitas pelaksanaan program akan terpengaruh. Karena tidak mampu melakukan kinerja dengan baik[25]. Hasil penelitian berdasarkan wawancara terkait indikator sumber daya pada sub indikator sumber daya manusia operator untuk aplikasi e-buddy di Pemerintah Desa Prasung yaitu Kaur TU dan masih belum mampu melakukan kinerja dengan baik, pada sub indikator sumber daya peralatan sudah memadai namun masih ada kendala di internet, sedangkan pada sub indikator kewenangan sudah terlaksana dengan baik, dengan mengacu pada Peraturan

Bupati Sidoarjo No. 95 tahun 2022 agar tidak melanggar dari aturan yang sudah ada. Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Khofifatul Ummah dan Ilmi Usrotin Choiriyah, pada tahun 2023, yang berjudul *Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)*. Hasil penelitiannya pada sub indikator sumber daya manusia menyatakan bahwa pengelola akun E-Buddy milik Desa Kajeksan adalah Kaur TU dan pengguna lainnya yaitu para Aparatur Desa lainnya. pada sub indikator sumber daya peralatan menyatakan bahwa pada penerapan aplikasi e-buddy juga terdapat komputer, keyboards, mouse, CPU, dan printer. Sedangkan pada sub indikator kewenangan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku admin E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan berwenang dan mempunyai batas tugas sebagai penanggungjawab akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan yang berkaitan dengan penerimaan surat masuk, surat keluar, serta meneruskan surat dinas [12].

### 3. Disposisi

Menurut Edward III Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaksana kebijakan untuk sungguh-sungguh melaksanakan suatu kebijakan guna mewujudkan tujuan kebijakan. Indikator disposisi dalam implementasi terdiri dari pengangkatan birokrasi dan insentif.

Pengangkatan birokrat, pengangkatan birokrat merupakan proses yang sangat penting dalam organisasi, karena akan menentukan kinerja dari sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi [25]. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa Prasung pada tanggal 10 Januari 2024

*"Pengangkatan birokrasi untuk menjadi Perangkat Desa di Pemerintah Desa Prasung ini adalah hak Kepala Desa, Seitiap pengangkatan birokrasi dan sebagainya, selalu ada kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan, dan kami mengacu pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2. Salah satu isinya yaitu Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa"*.

Dari wawancara tersebut, Pemerintah Desa mengacu pada UU Desa pasal 26 ayat 2. Untuk itu pengangkatan birokrasi dilakukan dengan memperhatikan poin-poin penting sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini diupayakan untuk menghasilkan calon aparatur yang kompeten dan dapat mengembangkan organisasi menjadi lebih baik.

Insentif, Insentif merupakan indikator yang mempengaruhi sikap dalam proses implementasi. Untuk mempengaruhi karyawan perlu menerapkan strategi insentif. Salah satu strateginya adalah dengan memanipulasi insentif agar dapat memicu kinerja karyawan dalam suatu organisasi [25]. Kepala Desa menjelaskan bahwa

*"aparatur desa yang berprestasi tentunya akan mendapatkan insentif, sehingga akan memotivasi para aparatur yang melaksanakan kegiatan pelayanan agar mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Insentif diberikan kepada aparatur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan motivasi kerja pada aparatur desa tersebut"*

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024 tersebut menunjukkan bahwa insentif sangat penting di proses implementasi karena dengan demikian implementasi akan merasa termotivasi dan dapat meningkatkan semangat kerja sehingga pelayanannya akan menjadi baik.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara terkait indikator disposisi Pemerintah Desa Prasung sudah berusaha semaksimal mungkin seperti pengangkatan birokrasi Pemerintah Desa Prasung masih mengacu pada UU Desa agar sesuai dan tidak melanggar aturan yang ada, selanjutnya untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik maka juga ada insentif agar pelaksana dapat termotivasi dan menjadi semangat bekerja. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari andika putra yang mengatakan bahwa dukungan dari pemimpin atau organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang efektif. Contohnya seperti menempatkan program sebagai prioritas kegiatan, penempatan pendukung staf yang tepat [25]. Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Mutiar Fitri Dewi (2023), berjudul *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (Simbg) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Dpupr) Kota Palangkaraya*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Penambahan insentif akan otomatis masuk apabila pegawai pelayanan mendapatkan reward atas hasil kerja dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan [25].

### 4. Struktur birokrasi

Variabel terakhir dalam teori implementasi kebijakan Edward III yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi termasuk yang paling mungkin menjalankan aktivitas secara keseluruhan. Birokrasi tidak hanya ada pada instansi pemerintah saja, namun juga pada organisasi swasta. Berdasarkan hal tersebut, memahami struktur birokrasi merupakan elemen mendasar dalam mempelajari implementasi kebijakan publik. Dan struktur birokrasi mempunyai dua ciri utama yaitu SOP dan fragmentasi.

Standard Operational Procedure, SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas dan berguna agar proses

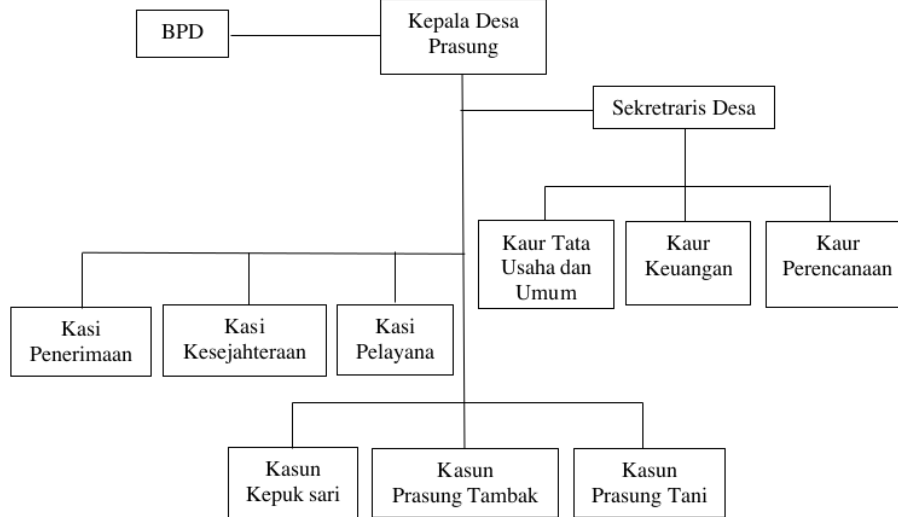
birokrasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terkait dengan SOP dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Kaur TU mengungkapkan bahwa

*“tidak ada SOP tertentu dalam mengimplementasikan aplikasi e-buddy, namun Pemerintah Desa Prasung tetap mengikuti petunjuk pelaksanaannya yang sudah tertera pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 30 Tahun 2020”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Prasung beracuan pada Perbup No. 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah dinas Elektronik, yang dimana didalamnya sudah terdapat urutan dalam penggunaannya.

Fragmentasi, Fragmentasi merupakan ciri kedua yang termasuk dalam variabel struktur birokrasi. Fragmentasi juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan di antara berbagai entitas yang berbeda, yang memerlukan koordinasi.

**Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Prasung**



Sumber: Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo (2024)

Berdasarkan gambar 5, Struktur organisasi pemerintahan desa Prasun menunjukkan bagaimana kegiatan kerja dipisahkan satu sama lain dan bagaimana hubungan antara kegiatan dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini, pola koordinasi yang ada menunjukkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan setiap bagian organisasi berhubungan dengan rantai komando langsung melalui Kepala Desa.

Struktur organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh kebutuhan pemerintah untuk menjalankan fungsi nasional. Hal ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pembagian kekuasaan pemerintahan yang diikuti dengan pelaksanaan pembentukan struktur organisasi untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan [26]. Hasil penelitian berdasarkan wawancara terkait indikator Struktur birokrasi sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dan menempatkan pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Desa sebagai Aparatur tertinggi. Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Khofifatul Ummah dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2023), berjudul Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa SOP untuk implementasi e-buddy di Pemerintah Desa Kajeksan juga beracuan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dimana yang dimaksud Penyelenggaraan naskah dinas elektronik dilaksanakan menggunakan aplikasi surat elektronik [12].

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (e-buddy) Di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan dari empat indikator implementasi sebagai berikut: 1). Komunikasi di Pemerintah Desa prasung dalam implemetasi e-buddy sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan seperti minimnya keterampilan dalam bimbingan teknis dan belum konsisten dalam penggunaan aplikasi e-buddy guna menyampaikan informasi surat dinas, karena masih ada yang menggunakan WhatsApp sebagai alternative. 2). Sumber daya untuk operator aplikasi e-buddy Pemerintah Desa Prasung menunjukkan bahwa Kepala Tata Usaha dan Umum masih menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Meskipun sumber daya peralatan sudah mencukupi, namun masih terdapat kendala terkait akses internet. 3). Disposisi Pemerintah Desa Prasung sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pengangkatan birokrasi yang mengacu pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 agar sesuai dan tidak melanggar aturan yang ada. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas layanan terdapat insentif yang diberikan agar para pelaksana termotivasi dalam menjalankan tugasnya. 4). Struktur birokrasi telah mematuhi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor.30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dan menegaskan peran kepala desa sebagai aparat teringgi dalam koordinasi yang terbentuk.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Berkat nikmat, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan jurnal Implementasi Program Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (e-buddy) Di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Selesaiannya jurnal ini, bukanlah akhir, melainkan awal baru petualangan hidup baru.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam selesainya jurnal ini. Tidak ada persembahan yang lebih besar bagi penulis selain mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantunya. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Isnaini Rodyah, M.Si selaku dosen pembimbing yang sabar, telah meluangkan waktunya untuk memberikan tenaga, pikiran, dan tidak pernah gagal untuk mendukung penulis dalam menulis jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Syafi'i S.AP, M.AP selaku Kepala Desa, M. Zaky Agil Rahmawan S.H selaku Sekretaris Desa, serta Ibu Luluk Hakimah selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di Pemerintahan Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Dan yang tak kalah pentingnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga, Karena tanpa doa restu dan dukungan dari mereka tidak akan mudah bagi penulis untuk mengerjakan jurnal ini. Begitu pula dengan rekan-rekan seperjuangan yang tidak segan-segan membantu dan menyemangati penulis. Dan meskipun penulis tidak dapat menyebutkan nama satu per satu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam jurnal ini.

Terlepas dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan jurnal ini, penulis dengan tulus menyambut baik segala masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan jurnal ini. Banyak kesulitan yang penulis hadapi saat membuat jurnal ini, namun alhamdulillah berhasil diselesaikan. Akhir kata, penulis berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang terlibat dan semoga menjadi amal baik.

## REFERENSI

- [1] S. Kamaruddin, "ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Antara Teori dan Aplikasinya," *Penerbit Ombak*, no. September, pp. 1–229, 2016, [Online]. Available: <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=349a0ada-0d19-cc5f-2776-e90886da1735&documentId=e4a8153f-e14a-3a02-a647-dfbbb59f5582>
- [2] I. N. 3 T. 2003 T. K. D. S. N. P. E-GOVERNMENT, "INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT," vol. 2004, pp. 1–3, 2004, [Online]. Available: <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=349a0ada-0d19-cc5f-2776-e90886da1735&documentId=e4a8153f-e14a-3a02-a647-dfbbb59f5582>
- [3] P. N. 6 T. 2011 TENTANG, P. UMUM, T. N. D. E. 01LINGKUNGAN I. PEMERINTAH, and PEMERINTAH, "TENTANG, PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2011 UMUM, PEDOMAN PEMERINTAH, TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 01LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH," 2008.
- [4] Sedarmayanti, "Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja," *J. Wacana Ekon.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2017, [Online]. Available: [http://repository.unitomo.ac.id/525/1/bedah buku perencanaan %26 pengembangan sumber daya manusia.pdf](http://repository.unitomo.ac.id/525/1/bedah%20buku%20perencanaan%20pengembangan%20sumber%20daya%20manusia.pdf)
- [5] D. Kusnadi and J. Ma'ruf, "Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Kelurahan Pringsewu Selatan," *J. TAM ( Technol. Accept. Model )*, vol. 5, no. 2, pp. 37–44, 2015.
- [6] T. Kutlu, "IMPLEMENTASI APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK (E-OFFICE) BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA," vol. 4, no. 1, pp. 88–100, 2023.
- [7] M. S. Siregar and S. Syakrani, "Implementasi Aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (Sinde) Dalam Sistem Layanan Persuratan Di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan," *AS-SIYASAH J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 2, p. 140, 2023, doi: 10.31602/as.v8i2.12122.
- [8] P. B. S. N. 46 T. 2018, TENTANG, T. K. T. I. D. K. M. S. C. D. K. SIDOARJO, and N. Anggita, "PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENUJU SMART CITY DI KABUPATEN SIDOARJO," 2018.
- [9] P. B. S. N. 30 T. 2020, TENTANG, P. K. A. P. B. N. 29 T. 2010 T. T. N. DINAS, and D. L. P. K. SIDOARJO, "PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO," *Satukan Tekad Menuju Indones. Sehat*, vol. 2015, 2020.
- [10] D. Isi, "Login Memberi Akses Surat Masuk ( Khusus Admin OPD )," 2020.
- [11] I. K. Publik, *Implementasi Kebijakan Publik*.
- [12] E. K. S. E-buddy, S. Kasus, D. Kajeksan, K. Tulangan, and K. Sidoarjo, "Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas," pp. 1–18, 2020.
- [13] V. A. S. M. Rahmadanik, "Inovasi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Penggunaan E-Buddy," *Praja Obs. Penelit. Adm. Publik*, vol. 2, no. 03, pp. 99–114, 2022.
- [14] Ariani Pujilestari and Irfan Ridwan Maksum, "Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta," *J. Niara*, vol. 15, no. 2, pp. 211–220, 2022, doi: 10.31849/niara.v15i2.9942.
- [15] N. Farida, "dalam Penelitian Pendidikan Bahasa," vol. 1, no. 1, p. 305, 2008.
- [16] J. Issn, "80.+Maulidia+Rizky+Rahman+1410-1423," vol. 6, pp. 1410–1423, 2023.
- [17] A. Pranata, "Implementasi Penerapan Program Surat Digital (Surat) Terhadap Percepatan Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat," pp. 1–110, 2018, [Online]. Available: [repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id)
- [18] M. Achmad, Hamsah, and Nurkadarwati, "Implementasi Kebijakan Sistem E-Surat Dalam Mewujudkan E-Government Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah," *J. Ilm. Adm. Pemerintah. Drrh.*, vol. 13, no. 1, pp. 108–117, 2021.
- [19] K. D. I. K. P. A. K. D. D. K. D. C. S. K. B. MONGONDOW and HAFIS, "KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DILAKUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW HAFIS," 1999.
- [20] M. Mirza and S. Aisyah, "Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau," *JIPI J. Ilmu Adm. Dan Pemerintah. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 14–34, 2020,

- doi: 10.33830/jiapi.v1i1.18.
- [21] P. humisar Parsaorantua, Y. Pasoreh, and sintje A. Rondonuwu, "Implementasi teknologi informasi dan komunikasi," *Acta Diurna*, vol. VI, no. 3, pp. 1–14, 2017.
- [22] L. Fitrianingrum, D. Lusyana, and D. Lellyana, "Pengembangan Karier Jabatan Fungsional dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi dan Tantangan," *Civ. Serv.*, vol. 14, no. 1, pp. 43–54, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/269/203>
- [23] I Putu Santika, I Ketut Mustika, and Ni Luh Kuni Hari, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *J. Appl. Manag. Stud.*, vol. 4, no. 1, pp. 24–36, 2022, doi: 10.51713/jamms.v4i1.58.
- [24] M. A. Datus Salam and B. Rosy, "PENGARUH SARANA PRASARANA dan KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT," *Publik J. Manaj. Sumber Daya Manusia, Adm. dan Pelayanan Publik*, vol. 9, no. 3, pp. 377–391, 2022, doi: 10.37606/publik.v9i3.360.
- [25] S. Di, D. Pekerjaan, U. Dan, and P. Ruang, "AT PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING OFFICE OF PALANGKARAYA CITY Melakukan pelayanan kepada publik atau masyarakat merupakan salah satu tugas pokok Pelaksanaan tugas pokok pemerintah ini sejalan dengan isi Pasal 1 Ayat Tentang Administrasi Pemerintahan ya," vol. 49, no. 2, pp. 226–237, 2023, doi: 10.33701/jipwp.v49i2.3618.
- [26] A. Setiawan, "Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi," *Supremasi Huk. J. Kaji. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 2, p. 117, 2021, doi: 10.14421/sh.v10i2.2313.

# Maisaroh Umsida

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.um-sorong.ac.id">ejournal.um-sorong.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://eprints.ipdn.ac.id">eprints.ipdn.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://ijppr.umsida.ac.id">ijppr.umsida.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://ummaspul.e-journal.id">ummaspul.e-journal.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://mail.jptam.org">mail.jptam.org</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://aksiologi.org">aksiologi.org</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://archive.umsida.ac.id">archive.umsida.ac.id</a> Internet Source	1%

10

[bircu-journal.com](http://bircu-journal.com)

Internet Source

1 %

---

11

[repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id)

Internet Source

1 %

---

---

Exclude quotes      Off

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On